

SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Ditjen Pajak Mendapatkan Dukungan Data dan Informasi serta Perlindungan Hukum

Rabu, 20 Mei 2015 – Sebagai bagian dari upaya mengamankan target penerimaan pajak, pada hari ini di Istana Negara, diselenggarakan acara penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan beberapa pihak terkait pertukaran data dan informasi serta kesepakatan dalam bantuan penegakan hukum dan perlindungan hukum bagi pegawai pajak yang melaksanakan tugas, dengan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pihak-pihak yang menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama dengan Ditjen Pajak pada hari ini berasal dari Bank Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Sosial dan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan acara pemberian penghargaan oleh Menteri Keuangan kepada 8 Kementerian/Lembaga yang telah mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yaitu Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Pananaman Modal, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Komisi Pemilihan Umum

Guna menyukseskan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan mencapai target penerimaan pajak, dukungan data dan informasi serta penegakan dan perlindungan hukum bagi pelaksanaan tugas Ditjen Pajak merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan
Hubungan Masyarakat

ttd

Mekar Satria Utama
NIP 19680623 199311 1 001

SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN



BACKGROUND BERITA

ACARA YANG DISELENGGARAKAN DI ISTANA NEGARA HARI INI:

Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Nota Kesepakatan antara Kementerian Keuangan dan Pihak Ketiga Dalam Negeri di Istana Negara pada Rabu, 20 Mei 2015:

1. Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penegakan, Bantuan dan Perlindungan Hukum serta Pemulihan Aset di Bidang Perpajakan
2. Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak dan Kebijakan Agraria dan Tata Ruang
3. Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial tentang Pemantuan dan Pengawasan Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dalam rangka Mendukung Penerimaan Negara
4. Kementerian Keuangan dan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Para Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Pihak Ketiga di Istana Negara pada Rabu, 20 Mei 2015:

1. Direktorat Jenderal Pajak dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.
2. Direktorat Jenderal Pajak dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
3. Direktorat Jenderal Pajak dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
4. Direktorat Jenderal Pajak dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus.
5. Direktorat Jenderal Pajak dan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.
6. Direktorat Jenderal Pajak dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
7. Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial.
8. Direktorat Jenderal Pajak dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.